

**TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016**

KABUPATEN : BANGKA TENGAH

| | ASPEK | FOKUS | No. | IKK | RUMUS/ PERHITUNGAN | Jenis Data (Tahun 2016) | Capaian Klnerja | Keterangan | |
|---|---|--|-----|---|---|--|--|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH | Peraturan ttg ketertiban penataan ruang | 1 | Keberadaan PERDA IMB | Ada/tidak ada PERDA | - PERDA Nomor 9 Tahun 2014 Tentang perubahan atas PERDA Nomor : 47 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu - PERDA Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Bangunan dan Gedung - Perbup No. 45 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan | Ada | | |
| | | | 2 | Rasio Rumah ber IMB | Jumlah Rumah ber IMB dibagi jumlah rumah [1] seluruhnya | Jumlah rumah ber IMB sd. akhir Tahun 2016 sebanyak 963 unit. Jumlah seluruh rumah sd. akhir Tahun 2016, sebanyak 44.825 Unit. | 2,15% | | |
| | | | 3 | Keberadaan PERDA RTRW | Ada/tidak ada PERDA RTRW | PERDA Nomor : 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 - 2031 | Ada | | |
| | | Peraturan ttg kependudukan | | 4 | Pengurusan E-KTP | Jumlah penduduk yang telah terekam dalam E-KTP dibagi jumlah penduduk yang wajib ber KTP x 100% | - Jumlah penduduk yang telah terekam dalam E-KTP = 116.685 Orang - Jumlah penduduk yang wajib ber KTP = 118.304 Orang | 99% | Sumber data Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2016 |
| | 5 | | | Biaya KTP | Biaya KTP dalam PERDA | PERDA Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan | Tidak dipungut biaya | | |
| | | Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum) | 6 | Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk | Jumlah personil Satpol PP (PNS) pada akhir tahun 2016 | Personil Satpol PP (PNS) pada Tahun 2016, sebanyak = 24 orang Penduduk pada akhir tahun 2016, berjumlah = 174.378 Orang | 1,38 per 10.000 penduduk | $\frac{24}{174.378} \times 10.000$ | |
| | | Kebijakan bidang penanganan PSK, PKL, | 7 | Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL, atau PMKS | Ada atau tidak ada PERDA PSK dan PKL | Terdapat PERDA yang mengatur ttg PSK, PKL atau PMKS : | Ada | | |

| | ASPEK | FOKUS | No. | IKK | RUMUS/ PERHITUNGAN | Jenis Data (Tahun 2016) | Capaian Kinerja | Keterangan |
|---|---|--|-----|--|--|--|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | atau PMKS. | | | | - PERDA Nomor :17 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pelacuran - PERDA Nomor : 46 Tahun 2011 tentang Ketertiban umum (PKL) | | |
| | | Peraturan tentang Kebersihan Kabupaten | 8 | Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kabupaten | Ada atau tidak ada PERDA Kebersihan Kabupaten | PERDA Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengolahan Sampah | Ada | |
| 2 | KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH | Penyampaian laporan kepada pemerintah | 9 | Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2007 | Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan | Bukti Pengiriman : LPPD Tahun 2016 disampaikan pada tanggal 27 Maret 2017 sesuai surat pengantar Nomor 045.2/ 24 /II/2017 | Tepat | |
| | | Penyampaian laporan keuangan dan kinerja | 10 | Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006 | Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan | Bukti Pengiriman: - Laporan Keuangan 2016, disampaikan pada tanggal Maret 2017 sesuai surat pengantar Nomor 045.2/ /DPPKAD/2017 - Laporan Kinerja (LAKIP) tahun 2016 disampaikan pada tanggal Maret 2017 sesuai surat pengantar Nomor 045.2/ 59 /VII/2017 | Tepat | |
| | | Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) | 11 | Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah (5) (CUKUP MENGENAI 6 SPM Yang SUDAH DIPERDAKAN) | Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan Penetapan oleh Menteri/ Pimpinan LPND. | Urusan yang diterapkan oleh Pemda sebanyak 15 urusan, yang terdiri dari: 1) Urusan Bidang Kesehatan 2) Urusan Bidang Pendidikan 3) Urusan Bidang Ketenagakerjaan 4) Urusan Bidang Kesenian 5) Urusan Bidang Perempuan dan anak korban kekerasan 6) Urusan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 7) Urusan Bidang Perhubungan 8) Urusan Bidang Lingkungan Hidup 9) Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang 10) Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika 11) Urusan Bidang Penanaman Modal 12) Urusan Bidang Sosial | 15 Urusan | Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor 188.45/ 385 /VII/2016 |

| | ASPEK | FOKUS | No. | IKK | RUMUS/ PERHITUNGAN | Jenis Data (Tahun 2016) | Capaian Kinerja | Keterangan |
|---|-------|-----------------------|-----|------------------------------|--|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | 13) Urusan Bidang Ketahanan Pangan 14) Urusan Bidang Perumahan Rakyat 15) Urusan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri | | |
| | | Hubungan antar daerah | 12 | Kerjasama dengan daerah lain | Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun 2016 | Terdapat MoU/Kerjasama yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah antara lain; 1. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dengan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada tentang Kerjasama Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Daerah. 2. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dengan President University tentang Pemberian Beasiswa Jababeka Kepada Putra-Putri Berprestasi Kabupaten Bangka Tengah 3. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dengan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Stasiun Kepulauan Bangka Belitung 4. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dengan Deputi Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Proyek Pengembangan Industri Rumahan bagi Perempuan di Kabupaten Bangka Tengah. 5. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Bangka tentang Kerjasama dalam Pengendalian Penyakit pada Tanaman Lada. | ada 10 | |

| | ASPEK | FOKUS | No. | IKK | RUMUS/ PERHITUNGAN | Jenis Data (Tahun 2016) | Capaian Kinerja | Keterangan |
|---|--|--|-----|----------------------------------|--|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | <p>6. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pangkalpinang tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Melalui Pelayanan</p> <p>7. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dengan Kabupaten Bangka Tengah dengan Universitas Lampung tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya.</p> <p>8. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dengan Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Peduli Jawa Barat tentang Pembangunan dan Pengembangan Wahana Belajar Sebagai Tempat Rekreasi Wisata Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</p> <p>9. Kerjasama antara Bupati Bangka Tengah dengan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian.</p> <p>10. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dengan Universitas Andalas tentang Kerjasama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia.</p> | | |
| 3 | KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH | Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah | 13 | Kesesuaian prioritas pembangunan | Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah prioritas pembangunan nasional [2] | - Prioritas pembangunan daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak 11 program. | 100% | |

| | ASPEK | FOKUS | No. | IKK | RUMUS/ PERHITUNGAN | Jenis Data (Tahun 2016) | Capaian Kinerja | Keterangan |
|---|-------|------------|---|---|--|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | - Prioritas pembangunan nasional ada sebanyak 11 program prioritas. | | |
| | | Kewenangan | 14 | Urusan wajib yang diselenggarakan daerah | Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah dibagi 26 (Jumlah urusan wajib di PP 38/2007) X 100% | - Urusan Wajib yang dilaksanakan pada Tahun 2016 (APBD) = 26 Urusan. - Urusan Wajib berdasarkan PP no. 38/2007 = 26 Urusan | 100,00% | |
| | | Keuangan | 15 | Waktu penetapan PERDA APBD 2016 | Tepat atau tidak tepat waktu penetapan PERDA APBD 2016 | PERDA Kab Bangka Tengah Nomor 16 Tahun 2015 ttg APBD Kab Bangka Tengah TA 2016, ditetapkan tanggal 29 Desember 2016 | Tepat | |
| | 16 | | Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005 | Ada atau tidak adanya PERDA ttg pengelolaan keuangan daerah | PERDA Kab Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 ttg Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah | Ada | | |
| | 17 | | Belanja untuk pelayanan dasar | Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X 100% | Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2015: 1) Urusan Pendidikan Rp. 210,786,205,629 2) Urusan Kesehatan Rp. 118,312,781,724.92 3) Urusan Lingkungan hidup Rp. 12,620,313,066.79 4) Urusan Pekerjaan Umum Rp. 124,038,163,498 5) Urusan Sosial Rp. 12,033,738,123 6) Urusan Ketenagakerjaan Rp. 447,076,900 7) Urusan Koperasi dan UMKM Rp. 1,395,469,621 8) Urusan Satpol PP/Kesbang PDN Rp. 13,209,010,109 9) Urusan Kependudukan & Capil Rp. 4,964,631,611 - Total Belanja pelayanan dasar Rp. 497,807,390,282.71 - Total Belanja APBD 2016, sebesar Rp. 856,803,008,626.48 | 58,10% | | |
| | | | 18 | Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan | Jumlah belanja untuk kesehatan dan pendidikan | Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2016. | | |

| | ASPEK | FOKUS | No. | IKK | RUMUS/ PERHITUNGAN | Jenis Data (Tahun 2016) | Capaian Kinerja | Keterangan |
|---|-------|------------------|-----|--|--|---|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | dibagi Jumlah total belanja X 100% | 1) Urusan Pendidikan Rp. 210,786,205,629 2) Urusan Kesehatan Rp. 118,312,781,724.92 - Total Belanja Pendidikan & Kesehatan Rp. 329,098,987,353.92 - Total Belanja APBD 2016, sebesar Rp. 856,803,008,626.48 | 38,41% | |
| | | Pelayanan Publik | 19 | Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik [3] sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Ada atau tidak adanya standar pelayanan publik | Terdapat PERDA tentang Standar Pelayanan Publik, antara lain; 1. Perda No. 1 Tahun 2015 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 2. PERDA Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 3. Perda No. 16 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. 4. Perda No. 4 Tahun 2014 tentang Eliminasi Malaria 5. Perda No. 2 Tahun 2015 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan Ruang Laktasi | Ada 5 Perda | |
| | | Kepegawaian | 20 | Ratio PNS terhadap penduduk | Jumlah PNS Kabupaten dibagi jumlah penduduk | - Jumlah PNS Kabupaten tahun 2016 sebanyak 3.086 orang. - Jumlah penduduk Kabupaten tahun 2016 sebanyak 174.378 orang. | 1,77% | |
| | | | 21 | Sistem Informasi Kepegawaian | Ada atau tidak adanya data base kepegawaian | Sistem database: 1. Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Online dengan BKN 2. Sistem Informasi Kepegawaian (SIK) Selawang Segantang. | Ada | |
| | | Kelembagaan | 22 | Penataan SKPD | Jumlah pembentukan SKPD berdasarkan PP 41/2007 | Jumlah SKPD, sbb: 1) Bagian (Setda) = 9 unit 2) Dinas = 13 unit | 42 unit | Dasar Hukum: - Perda nomor 5 Tahun 2013 tentang perubahan atas perda nomor 1 tahun 2011 tentang pembentukan organisasi dan tata |

| | ASPEK | FOKUS | No. | IKK | RUMUS/ PERHITUNGAN | Jenis Data (Tahun 2016) | Capaian Kinerja | Keterangan |
|---|---|--------------------------------------|-----|---|--|--|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | 3) Badan = 8 unit 4) Kantor = 2 unit 5) Rumah Sakit = 1 unit 6) Inspektorat = 1 Unit 7) Sekretariat DPRD = 1 Unit 8) Lembaga Teknis lainnya = 1 unit 9) <u>Kecamatan/Distrik</u> = 6 unit Jumlah SKPD = 42 unit | | pembentukan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan - Perda nomor 13 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas perda nomor 24 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas daerah Kabupaten Ranau Tengah - Perda Nomor 14 tahun 2014 tentang pembentukan organisasi dan tatakerja lembaga teknis daerah |
| 4 | EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD | Produk peraturan perundangan | 23 | PERDA yang ditetapkan (BAG HUKUM) | Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2016 | PERDA yang ditetapkan dalam Tahun 2016, sebanyak 14 Perda (Daftar terlampir) | 14 PERDA | |
| | | RAPERDA yang diajukan tahun berjalan | 24 | RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2016 (BAG HUKUM/SETWAN) | Jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2015 dibagi Jumlah RAPERDA yang diusulkan tahun 2015 | - RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2016, sebanyak 14 PERDA. - RAPERDA yang diusulkan tahun 2016, sebanyak 14 RAPERDA. | 100% | |
| 5 | EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN | Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti | 25 | Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti. (BAG HUKUM/SETWAN) | Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh Pemda dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan dalam tahun 2016 x 100% | - Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh Pemda dalam tahun 2016, sebanyak 2 keputusan. - Keputusan DPRD dalam tahun 2016, sebanyak 2 keputusan. | 100% | |
| 6 | EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN | Tindaklanjuti keputusan Bupati | 26 | Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti (BAG HUKUM/SETWAN) | Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keputusan Bupati dalam tahun 2016 x 100% | - Keputusan Bupati tahun 2016 yang ditindaklanjuti, sebanyak 1.147 keputusan. - Keputusan Bupati tahun 2016, sebanyak 1.147 keputusan. | 100% | |

| | ASPEK | FOKUS | No. | IKK | RUMUS/ PERHITUNGAN | Jenis Data (Tahun 2016) | Capaian Kinerja | Keterangan |
|---|--|-------------------------------|-----|---|--|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 27 | Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti oleh PEMDA | Jumlah rekomendasi DPRD tentang LKPJ tahun 2015 yang ditindaklanjuti oleh PEMDA pada tahun 2016 dibagi jumlah rekomendasi DPRD tentang LKPJ tahun 2015 | - Jumlah rekomendasi DPRD tahun 2015 yang ditindaklanjuti oleh PEMDA tahun 2016 sebanyak 19 rekomendasi - Jumlah rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun 2015 sebanyak 19 rekomendasi | 100% | |
| | | Tindakanlanj Peraturan Bupati | 28 | Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti (BAG HUKUM) | Jumlah Peraturan Bupati yang ditindak-lanjuti dibagi jumlah Peraturan WaliKabupaten dalam tahun 2014 x 100% | - Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti, sebanyak 94 Peraturan Bupati. - Peraturan Bupati dalam tahun 2016, sebanyak 94 PerBupati. | 100% | |
| 7 | KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | PERDA yang dibatalkan | 29 | Jumlah PERDA yang dibatalkan (BAG HUKUM) | Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi x 100% | - Tidak Ada PERDA yang dibatalkan - PERDA yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak 8 PERDA antara lain : 1. PERDA No. 9 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021 2. PERDA No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah 3. Perda NO. 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2016 4. Perda No. 14 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 5. Perda No. 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah | 100% | |

| | ASPEK | FOKUS | No. | IKK | RUMUS/ PERHITUNGAN | Jenis Data (Tahun 2016) | Capaian Kinerja | Keterangan |
|---|--|--|-----|--|---|---|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | 6. Perda No. 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tengah Perubahan 2005 - 2025 7. Perda Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Pangkalanbaru dan Koba Tahun 2015 - 2035 8. Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi) | | |
| 8 | INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH | PERDA tentang konsultasi publik | 30 | Keberadaan PERDA/PerBupati tentang konsultasi publik (BAG HUKUM) | Ada/tidak PERDA/PerBupati | Perbup nomor 34 Tahun 2010 tentang pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bangka Tengah | Ada | |
| | | Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik | 31 | Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website Kabupaten, pos, bag/biro humas, leaflet/brosur) (BAG HUKUM) | Ada atau tidak ada media Informasi yang ditetapkan dengan PerBupati | - Website Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (http://www.bangkatengahkab.go.id/index.php) - Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 465 Tahun 2013 Tentang Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio Selawang Segantang 93,9 FM | Ada | |
| 9 | TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL | Serapan dana perimbangan | 32 | Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan (BAG KEUANGAN / DPPKAD) | Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan x 100% | - Dana perimbangan yang terserap Tahun 2016 sebesar Rp. 623,254,121,900 - Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2016 sebesar Rp. 661,498,126,400 | 94,22% | Laporan Keuangan pada posisi Anaudit BPK |
| | | Realisasi Belanja pada APBD dari DAU | 33 | Belanja Publik terhadap DAU (DPPKAD) | Jumlah belanja publik dibagi DAU x 100% | - Realisasi Belanja langsung APBD tahun 2016, sebesar Rp. 470,441,715,206.48 - Realisasi DAU Tahun 2015, sebesar Rp. 436,502,048,000 | 107,78% | Laporan Keuangan pada posisi Anaudit BPK |

| | ASPEK | FOKUS | No. | IKK | RUMUS/ PERHITUNGAN | Jenis Data (Tahun 2016) | Capaian Kinerja | Keterangan |
|----|--|--------------------------------------|-----|---|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Realisasi Belanja pada APBD | 34 | Belanja Langsung terhadap total Belanja APBD (DPPKAD) | Total belanja Langsung dibagi APBD x 100% | - Realisasi Total Belanja langsung APBD tahun 2016, sebesar Rp. 470,441,715,206.48 - Realisasi Total Belanja APBD Tahun 2015, sebesar Rp. 856,803,008,626.48 | 54,91% | Laporan Keuangan pada posisi Anaudit BPK |
| 10 | INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH | Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 35 | Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi) (DPPKAD) | Jumlah PAD dibagi jumla total pendapatan APBD (realisasi) X 100% | - Realisasi PAD APBD Tahun 2016, sebesar Rp. 74,332,357,194.39 - Realisasi Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2016, sebesar Rp. 798,695,475,058.33 | 9,31% | Laporan Keuangan pada posisi Anaudit BPK |
| 11 | EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD | Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu) | 36 | Opini ⁽⁶⁾ BPK terhadap LapKeu Daerah (INSPEKTORAT) | Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeu Daerah Daerah untuk 2 tahun terakhir | - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2014, dengan opini: Wajar Dengan Pengecualian - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2015, dengan opini: Wajar Dengan Pengecualian | - Opini tahun 2014 = WDP - Opini tahun 2015= WDP | Tahun 2016 masih dalam proses pemeriksaan BPK |
| | | Besaran SILPA | 37 | Rasio SILPA thdp total pendapatan (DPPKAD) | Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100% | - SILPA Tahun 2016, sebesar Rp. 6,672,524,804.22 - Realisasi Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2016, sebesar Rp. 798,695,475,058.33 | 0,84% | Laporan Keuangan pada posisi Anaudit BPK |
| | | Realisasi belanja | 38 | Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja | Realisasi belanja dibagi total anggaran belanja APBD X 100% | - Realisasi Belanja Tahun 2016, sebesar Rp. 856,803,008,626.48 - Total Anggaran Belanja dalam APBD Tahun 2016, sebesar Rp. 961,957,585,450 | 89,07% | |
| | | Pengawasan Inspektorat Kabupaten | 39 | Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti | Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2016 | - Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan tahun 2016 sebanyak 485 Temuan - Temuan BPK RI sampai dengan akhir Tahun 2016, sebanyak 496 temuan | 97,78% | |
| 12 | PENGELOLAAN POTENSI DAERAH | Peta potensi daerah | 40 | Rasio realisasi PAD 2016 terhadap potensi PAD | Jumlah realisasi PAD 2016 dibagi dengan potensi PAD X 100% (DPPKAD) | - Realisasi PAD Tahun 2016, sebesar Rp. 74,332,357,194.39 - Potensi PAD pada APBD Tahun 2016 APBD Rp. 80,289,202,000 | 92,58% | |

| | ASPEK | FOKUS | No. | IKK | RUMUS/ PERHITUNGAN | Jenis Data (Tahun 2016) | Capaian Kinerja | Keterangan |
|----|---|-----------------|-----|--|---|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Peningkatan PAD | 41 | Peningkatan PAD | Kenaikan/penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu x 100% | - Total PAD pada Tahun 2015 sebesar Rp. 66.341.267.135,93 - Total PAD pada Tahun 2016 sebesar Rp. 74.332.357.194.39 | 89,25% | |
| 13 | TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Penghargaan | 42 | Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2015. | Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2015. | Penghargaan yang diterima, sebanyak 35 yang terdiri dari 1. Pemkab Bangka Tengah mendapat Penghargaan atas Lakip tahun 2015 dengan nilai predikat B oleh Menpan RB RI tanggal 20 Januari 2016, yogyakarta 2. Dinas Dishubkominfo meraih penghargaan Plakat Wahana Tata Nugraha dari Kementerian Perhubungan RI Untuk Tahun 2016 ,diterima Pada Bulan Januari Tahun 2017 3. Bupati Bangka Tengah mendapat penghargaan atas dukungan kerjasama dan kontribusi penerimaan pajak tahun 2016 oleh KPP Pratama Bangka, pada tanggal 24 Maret 2016 4. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI Ferry Mursyidan Baldan di Jakarta, atas kebijakan pembebasan BPHTB dalam Program Legalisasi Asset. 5. Penghargaan pemenang Tunas Muda pemimpin Indonesia (TMPI) atas nama muslim yang mewakili Bangka Tengah di Forum Anak Nasional berhasil menang dalam mengirimkan tulisan yang menginspirasi seluruh anak mengenai hak dan kewajiban anak di acara Forum Anak Nasional, Mataram 19-22 Juli 2016. | 35 Penghargaan | |

| | ASPEK | FOKUS | No. | IKK | RUMUS/ PERHITUNGAN | Jenis Data (Tahun 2016) | Capaian Kinerja | Keterangan |
|---|-------|-------|-----|-----|-----------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | <p>6. Bupati Bangka Tengah Mendapat penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI atas Partisipasi Program Pembinaan Peserta Didik Melalui Home Stay Untuk Peserta festival dan lomba literasi tahun 2016</p> <p>7. Bangka Tengah mendapat penghargaan atas prestasi dalam mendorong percepatan penerbitan izin usaha mikro dan kecil (IUMK) kepada pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Bangka Tengah dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI, AA.G.N. PUSPAYOGA. Desember 2016</p> <p>8. Dinas Diperindag –UMKM mendapatkan penghargaan dari Kementerian Perdagangan, atas Pasar Tertib Ukur Tahun 2016 kepada Pasar Kayu Besi</p> <p>9. RSUD Bangka Tengah Lulus Akreditasi Program Khusus pada Bulan November 2016.</p> <p>10. Dinas Kehutanan dan Perkebunan untuk ketiga kalinya mendapatkan juara pertama kategori One Billion Indonesia Trees (OBIT) Tingkat Kepulauan Bangka Belitung yang diserahkan oleh Pjt. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam acara puncak hari menanam pohon Indonesia dan bulan menanam pohon Indonesia dan Hari menanam pohon Nasional di Mentok Bangka Barat Senin, 28 November 2016.</p> | | |

| | ASPEK | FOKUS | No. | IKK | RUMUS/ PERHITUNGAN | Jenis Data (Tahun 2016) | Capaian Klnerja | Keterangan |
|---|-------|-------|-----|-----|-----------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | <p>11. Kabupaten Bangka Tengah mendapat predikat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai dengan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Di Hotel Borobudur Jl. Lapangan Banteng selatan Jakarta Rabu 7 Desember 2016 oleh Ombudsman RI. Bangka Tengah terpilih menjadi Kabupaten dengan Standar Pelayanan Publik dengan kepatuhan tinggi (Zona Hijau) yang diberikan langsung oleh Wakil Presiden RI. Drs. M. Yusuf Kalla Bersama ketua Ombudsman RI kepada Plt. Bupati Bangka Tengah Ir. H. Ibnu Saleh, MM.</p> <p>12. Kementerian Hukum dan Ham RI memberikan penghargaan kepada Kabupaten Bangka Tengah sebagai Kabupaten peduli HAM tahun 2016 yang diberikan langsung oleh Menteri Hukum dan Ham Bapak Yasonna Laoly kepada Plt. Bupati Bangka Tengah Ir. H. Ibnu Saleh, MM.</p> <p>13. Bupati Bangka Tengah Mendapatkan penghargaan atas Dukungan dan Pembinaan Kepada Perusahaan yang telah mendapatkan Penghargaan Produktivitas Siddhakarya Tahun 2016.</p> <p>14. SMA 1 Koba Mewakili Kabupaten Bangka Tengah menyabet Juara 3 Lomba Toyota Eco Youth 10 kategori sains dari 25 finalis di Jakarta</p> <p>15. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mendapatkan penghargaan Anugerah Pahita Ekapraya Tahun 2016 Tingkat Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI ibu Yohana Yembise, Jakarta 21 Desember 2016</p> | | |

| | ASPEK | FOKUS | No. | IKK | RUMUS/ PERHITUNGAN | Jenis Data (Tahun 2016) | Capaian Kinerja | Keterangan |
|---|-------|-------|-----|-----|-----------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | <p>16. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Mendapat penghargaan Tanda Kehormatan Ksatria Bakti Husada Arutala, atas jasa menggerakkan dan memberdayakan Masyarakat untuk Hidup Sehat</p> <p>17. Bupati Bangka Tengah mendapat penghargaan sebagai tokoh lada Babel oleh forum komunikasi petani lada babel Kamis, 4 Agustus 2016.</p> <p>18. Tim PKK Desa Kurau meraih Prakarti Madya I dalam Perlombaan tertib administrasi PKK pada acara Jambore Nasional Kader PKK yang dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Bapak Tjahjo Kumolo yang langsung diterima oleh wakil ketua Tim PKK Kabupaten Bangka Tengah Hj. Iriani Melita Ibnu Saleh.</p> <p>19. PLKB terbaik Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung a.n Lukman Hakim, S.Fil, Peringatan Harganas</p> <p>20. Peserta KB Lestari terbaik Tingkat Provinsi Bangka Belitung a.n Tjin Muk Su dan Lie Hua pada kegiatan Harganas</p> <p>21. Pengelolaan Informasi Konseling Remaja terbaik tingkat Provinsi Bangka Belitung jalur masyarakat a.n Pik R Kalam desa Lampur pada kegiatan Harganas</p> <p>22. Juara Dua Kader KB Tingkat Provinsi Bangka Belitung a.n Suartika pada kegiatan Harganas</p> <p>23. Juara Dua Pengelola BKB HI a.n TP PKK Kecamatan Sungai Selan pada kegiatan Harganas</p> | | |

| | ASPEK | FOKUS | No. | IKK | RUMUS/ PERHITUNGAN | Jenis Data (Tahun 2016) | Capaian Kinerja | Keterangan |
|---|-------|-------|-----|-----|-----------------------|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | <p>24. Juara Dua pelaksanaan BKB HI a.n Kelompok BKB HI Tanjung Desa Tanjung Pura Kecamatan Sungai Selan pada Kegiatan Harganas</p> <p>25. Juara Dua FPKDRT Tingkat Provinsi Bangka Belitung a.n Kelompok Harmonis Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba pada peringatan Kesatuan Gerak PKK</p> <p>26. Juara Dua P2WKSS tingkat Provinsi Bangka Belitung a.n Desa Air Mesu Timur pada peringatan Hari Ibu</p> <p>27. Juara Tiga Kader BKB HI Tingkat Provinsi Bangka Belitung a.n Irma Suryani Desa Tanjung Pura Kecamatan Sungai Selan.</p> <p>28. Dinas Diperindag –UMKM mendapatkan penghargaan dari Kementerian Perdagangan, atas Pasar Tertib Ukur Tahun 2016 kepada Pasar Namang</p> <p>29. Dinas Diperindag –UMKM mendapatkan penghargaan dari Kementerian Perdagangan, atas Pasar Tertib Ukur Tahun 2016 kepada Pasar Air Mesu</p> <p>30. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Tengah mendapat penghargaan sebagai Juara I pengelola terbaik rumah sakit sayang ibu dan bayi (RSSI-B) dalam rangka peringatan hari ibu ke 88 tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</p> <p>31. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Tengah mendapatkan Penghargaan sebagai Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori "B" dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI</p> | | |

| | ASPEK | FOKUS | No. | IKK | RUMUS/ PERHITUNGAN | Jenis Data (Tahun 2016) | Capaian Kinerja | Keterangan |
|---|-------|---------------------------|-----|--|--|---|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | <p>32. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka Tengah mendapatkan Penghargaan sebagai Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori "A" dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI</p> <p>33. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka Tengah mendapatkan Penghargaan sebagai Zona Hijau atas Peran Aktif Mewujudkan Pelayanan Publik Prima dari Ombudsman RI</p> <p>34. Pemerintah kabupaten Bangka Tengah mendapatkan penghargaan dari Menetri Agama atas dukungan dan kontribusinya bagi Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia Bangka Tengah.</p> <p>35. RSUD kabupaten Bangka Tengah mendapat penghargaan dari BPJS Kesehatan sebagai Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Terbaik II se- Wilayah Kerja BPJS Kesehatan Kanwil Bangka Belitung.</p> | | |
| | | Pengadaan barang dan jasa | 43 | Keberadaan E-procurement | Ada/Tidak | Penerapan E-procurement mulai operasi pada bulan September tahun 2012. | Ada | |
| | | Daya saing daerah | 44 | Jumlah persetujuan investasi (BAPPEDA-SPM) | Jumlah ijin investasi dalam tahun 2016 | Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2016, sebanyak 31 ijin | 31 ijin | s.d 10 milyar |